



## **Kompetisi Diplomasi Ekonomi China dengan Taiwan di Amerika Latin Sebagai Implementasi Kebijakan Satu China**

Arif Baskoro

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;  
email: arifbaskoro30@gmail.com

Nuraeni

Pusat Studi Organisasi dan Kerjasama Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;  
email: nuraeni@unpad.ac.id

| Dikirim: 10 April 2019 | Direvisi: 10 Mei 2019 | Diterima: 25 Mei 2019 | Dipublikasikan: 31 Mei 2019 |

### **Keywords**

china,  
competition, economic  
diplomacy,  
taiwan

### **ABSTRACT**

*The purpose of this article is to describe the economic diplomatic competition between China and Taiwan in four countries in the Latin America region (Costa Rica, Panama, Dominican Republic, and El Salvador) on 2007-2018. The used concepts are competition concept in accordance to the global political economy framework and economic diplomacy. The used methodology in this article is qualitative research method by collecting data from several sources and also by using interview and correspondency to verify the required data. This article finds that there were economic diplomatic used in form of commercial diplomacy and financial aid by Taiwan and China to gain recognition from these countries mentioned; China's victory over Taiwan caused by the economic reformation on 1978 which increased China's economic power; also China's political interest towards Taiwan to reunite Taiwan as one of China's provinces since the leadership of Taiwan was taken by the Democratic Progressive Party whom rejects the one China policy.*

### **Kata Kunci**

cina,  
diplomasi ekonomi,  
kompetisi,  
taiwan

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetisi diplomasi ekonomi antara China dengan Taiwan di empat negara di wilayah Amerika Latin (Costa Rica, Panama, Republik Dominika dan El Salvador) pada periode 2007-2018. Konsep yang digunakan adalah konsep kompetisi berdasarkan kerangka ekonomi politik global dan juga konsep diplomasi ekonomi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data dari berbagai sumber data dan juga menggunakan wawancara dan korespondensi sebagai cara untuk memverifikasi data yang dibutuhkan. Artikel ini menemukan bahwa terdapat penggunaan diplomasi ekonomi berbentuk diplomasi komersil dan juga bantuan finansial yang dilakukan oleh Taiwan dan China untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara terkait; kemenangan China yang diakibatkan terjadinya reformasi ekonomi China pada 1978 yang meningkatkan kekuatan ekonomi China; serta adanya kepentingan politik China atas Taiwan dalam upayanya untuk menyatukan Taiwan sebagai bagian dari provinsi China pasca dipimpinya Taiwan oleh Partai DPP (*Democratic Progressive Party*) yang menolak keras kebijakan satu China.

## PENDAHULUAN

Berakhirnya perang sipil Cina pada 1949 telah menciptakan fenomena menarik dimana terciptanya dua entitas politik berbeda di wilayah Cina. Entitas politik pertama muncul dari partai komunis China yang menguasai daratan utama Cina atau *mainland*, sedangkan entitas politik kedua muncul dari partai Kuomintang yang memilih untuk mengasingkan diri di pulau selatan yang sekarang dikenal dengan nama Taiwan. Dikarenakan adanya perbedaan ini, telah terjadi kompetisi yang melibatkan kedua belah pihak. Dengan acuan kebijakan satu daratan Cina menurut versinya masing-masing, kedua pemerintahan yang berbeda ini terus terlibat dalam kompetisi melawan satu sama lain sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain melalui berbagai cara agar bisa diakui sebagai pemerintahan yang sah yang menguasai akan seluruh wilayah Cina (Cuchisi J. L., 2002, hal. 31-35).

Fenomena kompetisi dua entitas politik yang berbeda ini disebabkan karena adanya upaya dari Republik Rakyat China untuk menggeser keberadaan Taiwan dari sistem internasional. Salah satu wilayah sasaran pemerintah China sendiri adalah wilayah Amerika Latin. Strategi ini diberlakukan China dikarenakan sebegini besar dari negara yang mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan lebih banyak tersebar di wilayah Amerika Latin. Sejauh ini berdasarkan data kementerian luar negeri Taiwan, dari total 17 negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, 9 di antaranya berada di wilayah Amerika Latin (Ministry of Foreign Affairs of Taiwan, 2018).

Pasca terpecahnya daratan Cina yang menyebabkan pemerintahan Republik Cina harus pergi ke pulau Taiwan, maka beberapa hubungan diplomatik yang awalnya dimiliki oleh Taiwan mulai beralih dengan memutuskan untuk memilih pemerintah komunis China sebagai pemerintahan sah dan perwakilan resmi dari Cina. Melihat peristiwa ini, Taiwan melakukan banyak tindakan yang

dianggap perlu di berbagai wilayah yang mana salah satunya adalah di wilayah Amerika Latin agar bisa mempertahankan hubungan diplomatik yang telah dibangun oleh Taiwan. Didukung oleh perekonomiannya yang mengalami pertumbuhan semenjak 1970 yang terus menerus berkembang di kisaran angka 9% per tahunnya, menjadikan Taiwan memiliki kekuatan ekonomi tersendiri yang bisa dijadikan alat untuk mendapatkan kerjasama diplomatik dari negara lain (Lee, 1993, hal. 43-54).

Pada era 1990, Taiwan terus memperluas perannya di Amerika Latin dengan memberikan begitu banyaknya bantuan ekonomi dalam berbagai macam bentuk. Bantuan ini antara lain pemberian pinjaman uang untuk pembangunan bandara di Panama yang mencapai nilai USD 10 Juta, pemberian bantuan finansial untuk mendanai program-program kerjasama pendidikan dan juga program lingkungan terkait pengurangan polusi di El Salvador sebesar USD 5 Juta, dan juga kerjasama penyebaran industri kecil menengah di Republik Dominika. Pada waktu yang sama, pemerintah Taiwan menyatakan bahwa negaranya akan memfokuskan pemberian bantuan ekonominya kepada negara-negara di wilayah Amerika Latin dan Karibia di posisi kedua setelah Asia. Penetapan prioritas dari Taiwan terhadap wilayah Amerika Latin memberikan hasil yang cukup signifikan, dengan banyaknya bantuan ekonomi yang diberikan oleh Taiwan pada periode tersebut, banyak negara mulai tertarik untuk menjalin hubungan diplomatik atau menjalin hubungan tidak formal dalam urusan ekonomi dan perdagangan dengan pemerintah Taiwan. Kerjasama ini tidak terbatas di negara menengah dan kecil saja, melainkan juga termasuk kepada negara-negara besar seperti Argentina, Brazil, Chile, dan Meksiko yang terbukti telah membuka kantor perwakilan dagang untuk Taipei pada periode antara 1989 sampai dengan 1992. (Lee, 1993, hal. 52)

Pasca terjadinya revolusi komunis dan diambil alihnya daratan Cina oleh partai komunis China pada 1949, China lantas

memulai pergerakannya agar bisa dapat lebih berperan dalam perekonomian global. Pada awalnya, pemerintah China memulai dengan memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang dan membutuhkan. Salah satu aksi pemberian bantuan ekonomi yang dilakukan China untuk pertama kali adalah dengan memberikan bantuan finansial kepada Korea Utara. Pada 1956 dalam konferensi Asia-Afrika yang diadakan di Bandung, China memperluas perannya dengan terus memberikan bantuan ekonominya yang terdiri dari donasi finansial dan juga pinjaman bebas bunga kepada negara-negara berkembang seperti Kamboja, Mesir dan juga Nepal. Pergerakan China ini dianggap oleh para pakar ekonomi politik global sebagai tindakan yang tidak hanya sebagai sebuah bentuk dari kebangkitan ekonomi China secara umum. Sebaliknya, China melakukan tindakan-tindakan bantuan ekonominya agar peran China dalam ruang lingkup global dapat dirasakan oleh negara lain sehingga bisa menggeser keberadaan Taiwan. Semenjak China memulai memberikan bantuan dan investasi asing di negara-negara berkembang yang dimulai pada 1950an, China lantas kian terus-menerus memperluas perannya ke wilayah lain.

Terdapat dua aspek utama yang menjadi tumpuan dalam peningkatan perkembangan ekonomi China di dalam kancah global ini. *Pertama*, hubungan kerjasama ekonomi baik berbentuk investasi asing atau *foreign direct investmen* maupun kerjasama perdagangan bebas. Bentuk *kedua* ialah bantuan ekonomi yang terbagi dalam bentuk bantuan bebas bunga, atau bantuan finansial dengan bunga rendah (*interest free/ low interest loans*) (Bartke, 1989, hal. 215).

Pada wilayah Amerika Latin, China dianggap mulai terlihat memfokuskan kerjasama ekonominya semenjak adanya peningkatan dari tahun 2000. Total investasi asing China di wilayah Amerika Latin pada 1990 juga hanya mencapai angka USD 6 milyar. Namun, pada 2000, China mulai

menancapkan investasinya pada Amerika Latin dimana terdapat peningkatan besar-besaran sampai mencapai angka USD 13 milyar untuk tahun 2000. Bahkan, dalam rentang waktu 10 tahun (2015-2025), China telah memproyeksikan investasi ekonominya yang ditargetkan kepada wilayah Amerika latin dengan target yaitu bisa memberikan investasi ekonomi asingnya sebesar USD 250 milyar (Chen & Ludena, 2014, hal. 13).

Kesuksesan pertama China dalam perang diplomasi dengan Taiwan di wilayah Amerika Latin ialah ketika China berhasil mendapatkan pengakuan diplomatik dari Uruguay pada 1988. Pengakuan ini disebabkan adanya penawaran China yang menjanjikan untuk meningkatkan impor kain *wool* dari Uruguay. Hal ini menyebabkan melonjaknya angka ekspor Uruguay yang awalnya sebesar USD 57 juta pada 1987 menjadi sebesar USD 123 Juta pada 1988. Hal ini menjauhkan Uruguay dari pengaruh ekonomi Taiwan dalam tahun itu, hanya berhasil melakukan impor barang dari Uruguay dengan nilai sebesar USD 26.3 juta (Esteban, 2008, hal. 27).

Selanjutnya, pada 2007, China kembali memenangkan kompetisi ekonomi di Amerika Latin dengan berhasil mendapatkan pengakuan diplomasi dari Costa Rica yang memilih untuk menjalin hubungan diplomatik dengan China sekaligus memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Berdasarkan data, pada 2007, ekspor Costa Rica kepada China mengalami peningkatan sebesar USD 1,7 milyar, bertolak belakang dengan ekspor keTaiwan yang bernilai USD 30 juta yang mana terdapat perbedaan yang cukup besar senilai 500%. Impor besar-besaran yang dilakukan China kepada Costa Rica menurut penelitian terdahulu dari He Li (2009) disebabkan karena China pada saat itu, dianggap sedang mengincar negara-negara yang dianggap bernilai strategis bagi hubungan diplomasi Taiwan di wilayah Amerika Latin. Hal ini dikarenakan sebelumnya Taiwan merupakan salah satu negara yang menjadi tumpuan bagi ekonomi Costa Rica khususnya pada aspek

ekspor dan impor. Pada periode tersebut, Taiwan merupakan negara pendonor terbesar kedua bagi Costa Rica dengan total sebesar USD 341 Juta dari 1990 sampai 2005 (Li, 2005, hal. 72-73).

Meski Taiwan mengalami kekalahan melawan China akan Costa Rica, Taiwan terus memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang dianggap tidak akan teruntungkan dengan keberadaan pasar China di Amerika Latin, khususnya negara-negara yang tergolong kedalam klasifikasi negara menengah dan kecil. Negara-negara yang dimaksud ini, misalnya, Panama, Guatemala, Honduras, El Salvador, dan juga Nicaragua. Pada 2006 sampai dengan 2008, Taiwan berhasil menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan ketiga negara ini yang mana mendukung untuk meningkatkan intensitas perdagangan Taiwan dengan negara-negara ini sampai dengan 29,8% (International Trade Bureau, 2010).

Pada 2017, Panama pada akhirnya memutuskan ikatan diplomatik dengan Taiwan dan memilih untuk mengakui pemerintahan China sebagai perwakilan resmi dari Cina. Keputusan hubungan ini ditegaskan dengan pernyataan pemerintah Panama yang menekankan bahwa Taiwan adalah provinsi dan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pemerintah China sebagai satu kesatuan negara. (Blanchard, 2017). Pasca penandatanganan perjanjian antara China dengan Panama pada bulan Januari 2018, sebuah perusahaan China bernama *China Harbour Engineering Company Ltd* memulai membangun pelabuhan di Panama dengan nilai sebesar USD 165 juta. Fasilitas pelabuhan ini nantinya direncanakan oleh pemerintah Panama akan digunakan untuk keperluan perdagangan melalui jalur perairan. Semenjak penandatanganan perjanjian diplomatik ini, China menjelaskan bahwa Panama akan mendapatkan pemenuhan kebutuhannya dari China sebagai bentuk kerjasama diantara keduanya semenjak terbentuknya hubungan diplomatik (Chansoria, 2018).

Kemenangan China dengan mendapatkan pengakuan diplomatik resmi dari negara-negara di Amerika Latin terus mengalami perkembangan. Pada 1 Mei 2018, Republik Dominika memilih untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Taiwan dengan beralih untuk mengakui pemerintahan China. Pemerintahan Taiwan merespon peristiwa tersebut dengan menuduh bahwa China hanya menggunakan kekuatan ekonominya untuk “menyogok” pemerintahan Republik Dominika agar bisa mendapatkan pengakuan diplomatik. China dituduh oleh pemerintahan Taiwan telah memberikan bantuan berupa insentif dan pinjaman dengan total nilai sebesar USD 3.1 Milyar agar Republik Dominika meninggalkan hubungan diplomatik yang sudah lama dibangun dengan pemerintah Taiwan dan beralih dengan China. Pemerintah Taiwan juga mengingatkan kepada Republik Dominika bahwa justru berkat bantuan dari Taiwan, Republik Dominika bisa berkembang sampai bisa menjadi salah satu eksportir beras terbesar di Amerika Latin (Yu, 2018).

Selanjutnya, pada Agustus 2018, El Salvador memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Taiwan. Pemerintah El Salvador memutuskan untuk memilih China sebagai perwakilan Cina yang secara sah diakui. Keputusan ini meninggalkan Taiwan dengan 17 negara lainnya yang masih tetap mengakui Taiwan sebagai pemerintah resmi Cina. Menteri luar negeri dari negara El Salvador Carlos Castaneda, menyatakan bahwa dengan menjalin hubungan diplomatik dengan China, El Salvador dipercaya akan memiliki kesempatan kerjasama ekonomi yang jauh lebih besar dan dianggap akan memiliki keuntungan lebih bagi negara El Salvador. (Liu, 2018)

Dengan putusnya hubungan Taiwan dengan Panama, Republik Dominika dan yang paling terbaru adalah El Salvador, sejauh ini tersisa sembilan negara di wilayah Amerika Latin dan Karibia yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan negara Taiwan. Negara ini adalah Belize, Haiti, Guatemala, Honduras,

Nikaragua, Paraguay, Saint Lucia, Saint Kit and Nevis, dan juga Saint Vincent & the Grenades. Hal ini menjadikan total dari sekutu diplomatik Taiwan saat ini berjumlah 17 negara (Ministry of Foreign Affairs of Taiwan, 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka fokus artikel ini adalah analisis penggunaan kekuatan ekonomi China dan Taiwan dalam keterlibatan kedua negara pada kompetisi diplomasi ekonomi yang terjadi dari periode 2007 sampai 2018. Artikel ini menggunakan konsep Kompetisi dan Diplomasi Ekonomi sebagai alat analisis untuk melihat diplomasi ekonomi apa saja yang digunakan oleh kedua belah pihak dan juga alasan dibalik mengapa China berhasil mendapatkan empat pengakuan dari negara-negara ini yang pada awalnya mengakui pihak Taiwan.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Kompetisi dalam Ekonomi Politik Global**

Tumilir (dalam Sally, 2002 hal. 153-159) menyatakan bahwa negara sebagai sebuah unit politik, memiliki tujuan untuk tetap bisa mempertahankan keberadaannya dalam sistem internasional. Oleh karena itu, negara akan terus melakukan segala sesuatu yang diperlukan dimulai dari tindakan hukum, kebijakan luar negeri sampai dengan tindakan ekonomi untuk bisa mencapai kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional yang sifatnya bebas dan sarat akan kompetisi. Kompetisi memiliki dampak positif dalam ekonomi politik global. Dengan adanya kompetisi, maka tidak akan ada negara yang sepenuhnya bisa menguasai sistem internasional. Negara lain akan terus melakukan perlawanan dan hal tersebut dipercaya akan terus membuat sistem internasional menjadi lebih baik: *"Nobody knows which policies are the best, and competition is a process of discovery to get to a better and stable condition"*.

Kompetisi dalam sistem perekonomian internasional pada dasarnya bersifat adil. Adil

disini bermakna bahwa setiap pihak atau dalam kasus ini adalah negara, memiliki titik mulai yang sama. Mengesampingkan kolonialisme yang berdampak pada tumbuh kembangnya negara, Tumilir menyebutkan bahwa dengan adanya kompetisi negara akan dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif. Layaknya pedagang dalam pasar, negara dituntut untuk bisa menarik negara lain untuk bisa bekerjasama dengannya, agar terdapat keuntungan atau kepentingan yang bisa dicapai oleh negara tersebut. Negara-negara berkembang juga masih memiliki kesempatan untuk terlibat dan bahkan memenangkan kompetisi dalam ekonomi politik global. Dia mencontohkan Singapura sebagai negara yang kecil dan tidak memiliki sumber daya sebagai bahan utama dalam menjalin kerjasama ekonomi internasional, tetap bisa bersaing dengan negara lain, dengan menggunakan sumber atau *capital* lainnya agar bisa tetap bertahan dalam sistem internasional. Tumilir menjelaskan bahwa komponen utama sebagai modal untuk terlibat dalam persaingan internasional, tidak bisa hanya mematok pada satu komponen saja, melainkan juga terdapat komponen lain yang tidak bisa ditinggalkan. Tumilir mencontohkan komponen lain selain komponen ekonomi seperti kemampuan manajerial dari pemerintahan untuk bisa mengatur negara dan juga kebijakan luar negeri negara yang harus bisa menciptakan kerjasama yang menguntungkan negara tersebut (Sally, 2002, hal. 153-159).

Kompetisi dalam ekonomi politik juga bisa disebabkan karena adanya keinginan dari negara pelaku kompetisi untuk bisa menjadi poros atau pusat dari segala tindakan ekonomi dan politik dalam sistem internasional. Menurut Glaser, negara atau aktor internasional lainnya, melakukan persaingan dengan tujuan untuk menjadi hegemon dan juga sebagai polar dalam suatu sistem, baik itu politik ataupun ekonomi ataupun keduanya. Kompetisi yang terjadi antara kedua pihak merupakan ajang pembuktian untuk menjadi

yang terbaik dalam sistem internasional (Glaser, 2010, hal. 5-15).

Ketika sebuah kompetisi terjadi, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait agar bisa memenangkan kompetisi tersebut. Cara apapun akan dilakukan untuk meraih kemenangan. Menurut Glass juga dalam kompetisi, tentunya ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Meskipun tidak dapat dijelaskan secara eksplisit, namun pada akhirnya, kompetisi dalam bentuk apapun akan berakhir dengan satu pihak yang kalah dalam kompetisi tersebut dan satu pihak menang (Glaser, 2010, hal. 5-15).

### Diplomasi Ekonomi

Masuknya ekonomi sebagai bentuk baru dari *power* menyebabkan diplomasi saat ini bisa menggunakan kekuatan ekonomi sebagai alat dalam pelaksanaannya. Dengan perkembangan ini, maka muncul bentuk baru diplomasi yang bisa disebut diplomasi ekonomi. Berdasarkan Bayne dan Woolcock, dapat didefinisikan bahwa diplomasi ekonomi adalah seperangkat kegiatan (baik dianggap sebagai metode ataupun proses dalam pengambilan keputusan) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (ekspor, impor, investasi, pemberian pinjaman, pemberiann sanksi ekonnomi, bantuan ekonomi, dan migrasi) yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara di dunia nyata. Mengutip langsung dari Bayne dan Woolcock (2003: 8-19), diplomasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai:

*“A set of activities (both regarding methods and processes for international decision making) related to cross-border economic activities (export, import, investment, lending, sanctions aid, and migration) pursued by state and non-state actors in the real world.”*

Diplomasi ekonomi bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk atau metode. Menurut Zirovcic, diplomasi ekonomi memiliki empat metode yang paling umum dan paling sering digunakan oleh suatu negara atau perusahaan multinasional. Metode dari diplomasi ekonomi tersebut antara lain berupa pemberian bantuan

ekonomi, pemberian sanksi ekonomi, *economy branding*, dan juga diplomasi komersil. Namun dalam artikel ini, hanya dua metode yang akan dibahas yaitu bantuan finansial dan diplomasi komersil (Zirovcic, 2009, hal. 3-10)

*Pertama*, bantuan ekonomi atau *financial aid* merupakan bentuk mendasar dari diplomasi ekonomi. Sederhananya, proses diplomasi ekonomi ini terjadi ketika sebuah negara atau perusahaan, memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa adanya harapan untuk dibayar kembali. Zirovcic menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi dalam bentuk ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan ketergantungan dari pihak yang diberikan bantuan, kepada pihak yang memberikan bantuan. Selain itu, diplomasi ekonomi dalam bentuk ini juga dipercaya dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara negara donatur dan negara penerima. Pemberian donasi ini kerap kali dilakukan oleh negara yang memiliki ekonomi maju kepada negara berkembang yang masih membutuhkan bantuan dana atau negara-negara yang sedang mengalami bencana alam. Bentuk nyata dari diplomasi ini antara lain *dollar diplomacy* dari Taiwan dan *yuan diplomacy* yang dilakukan oleh China (Zirovcic, 2009, hal. 5).

*Kedua*, *commercial diplomacy*, yakni cara bagaimana suatu negara bisa mencari, mendapatkan, mempertahankan dan mencapai keuntungan ekonomi dari negara yang diincarnya. Diplomasi ekonomi juga bisa ditujukan untuk mempengaruhi atau mengubah tindakan suatu negara. Tindakan seperti mempromosikan kerjasama ekonomi, mencari data mengenai sumber daya alam yang dibutuhkan, atau mempromosikan produk-produk nasional adalah salah satu praktik dari diplomasi komersil ini. Diplomasi komersil ini fokus untuk menjalin kerjasama ekonomi dan mendapatkan keuntungan material dari kegiatan tersebut (Zirovcic, 2009, hal. 9-10).

### METODE RISET

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan objek negara China, Taiwan dan posisi

kedua negara masing-masing dalam kebijakan satu daratan Cina, serta implementasinya terhadap strategi diplomasi ekonomi kedua belah pihak. *Level of analysis* yang digunakan adalah level negara yang berfokus pada negara China, Taiwan, dan juga beberapa negara di wilayah Amerika Latin yang memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan, seperti Costa Rica, Republik Dominika, Panama, dan El Salvador.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kompetisi Diplomasi Ekonomi China dengan Taiwan di Costa Rica**

Dalam kasusnya dengan Costa Rica selama periode 1990 sampai dengan akhir 2000, ditemukan bahwa pemerintah Taiwan pada awalnya terus melakukan hubungan dagang dengan nilai rata-rata per tahunnya berkisar di angka USD 9 juta. Hubungan dagang yang dilakukan oleh Taiwan dengan Costa Rica ini dianggap sebagai upaya Taiwan untuk mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan negara tersebut. Ekspor yang dilakukan oleh Taiwan pada periode ini kepada Costa Rica berfokus pada komoditas elektronik serta alat-alat penunjang agrikultur. Selain itu, dalam periode ini, pemerintah Taiwan juga memberikan bantuan berupa pinjaman dengan bunga rendah atau *low interest loans* kepada pemerintah Costa Rica sebesar USD 55 juta per tahunnya. Hal ini tentunya dinilai sangat menguntungkan bagi Costa Rica dari segi ekonomi. Dengan situasi ini, tentunya selama periode ini, Costa Rica tetap menjaga baik hubungan diplomatiknya dengan pihak pemerintah Taiwan. Hal ini dikarenakan Taiwan bisa memberikan bantuan yang sangat menguntungkan bagi kelangsungan perekonomian dan pembangunan Costa Rica. Selanjutnya, pada periode 2000 sampai dengan 2005, pemerintah Taiwan juga terus memberikan bantuan finansial sebanyak USD 11 juta per tahun kepada Costa Rica. Di sisi lain, Costa Rica juga tetap menjaga *foreign trade agreement* (FTA) dengan Taiwan. Perjanjian dagang ini terus menerus terjaga

dikarenakan hubungan antara keduanya yang tenang tanpa adanya gangguan dari pihak China<sup>i</sup>.

Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Taiwan secara terus menerus kepada pihak Costa Rica dapat terlihat sebagai upaya Taiwan untuk menjaga hubungan diplomatik sekaligus menjaga kerjasama perdagangan diantara keduanya yang tentunya tetap bisa memberikan keuntungan ekonomis bagi pihak Taiwan. Pernyataan ini dipertegas dengan informasi yang didapatkan dari Kang Chia-chi dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa hubungan diplomatik yang dimiliki Taiwan akan terus dijaga dengan diplomasi dari Taiwan. Upaya Taiwan untuk menjaga hubungan diplomasi yang dimilikinya disebabkan karena kondisi Taiwan sendiri yang memerlukan mitra dagang demi kelangsungan ekonominya. Hubungan dagang ini juga tentunya akan jauh lebih baik dan menguntungkan, jika dilakukan dengan negara-negara yang masih mengakui Taiwan sebagai negara. Maka dari itu, penjagaan hubungan diplomatik Taiwan dengan Costa Rica dengan memberikan bantuan finansial, tidak hanya bertujuan untuk menjaga status politik dari Taiwan sendiri, melainkan juga untuk membuka kesempatan berdagang antara kedua belah pihak yang juga bisa menguntungkan pihak Taiwan. Selama periode 2000 sampai dengan 2007<sup>ii</sup>, pemberian bantuan yang dilakukan Taiwan adalah upaya untuk menjaga hubungan diantara Taiwan dengan negara terkait, namun pemerintah Taiwan juga tidak akan hanya terus menerus memberikan bantuan tanpa adanya timbal balik yang menguntungkan bagi Taiwan. Timbal balik yang diharapkan oleh Taiwan sendiri adalah untuk adanya kesempatan untuk melakukan perdagangan dengan Costa Rica. Hal ini karena Taiwan juga memerlukan perdagangan agar adanya keuntungan tersendiri yang bisa didapatkan oleh Taiwan dengan dijalinnya hubungan diplomatiknya dengan Costa Rica. Maka dari itu, selama hubungan antara Costa Rica dengan Taiwan

masih berjalan, Taiwan berhasil melakukan perdagangan dengan Costa Rica dari periode 2000 sampai dengan 2007 sebesar US 30 Juta.

Di sisi lain, pada awal periode 2000, pemerintah China menawarkan perjanjian perdagangan seperti yang dimiliki oleh Taiwan dengan Costa Rica melalui *free trade agreement* (FTA). Pada saat negosiasi berlangsung, pemerintah China ikut serta memberikan bantuan finansial sebesar USD 2 juta per tahunnya kepada Costa Rica sampai dengan 2004. Pada periode ini, Costa Rica memutuskan untuk memberikan kesempatan dagang kepada China, melalui FTA tanpa adanya pengakuan resmi dari Costa Rica. Dimulai dari perjanjian dagang tidak resmi, China mulai bisa memberikan pengaruh diplomasinya kepada Costa Rica. Perkembangan hubungan antara keduanya dapat terlihat dari meningkatnya perdagangan diantara Costa Rica dengan China yang mana rata-rata nilai dagang diantara kedua negara ini mencapai angka USD 20 Juta per tahunnya. Nilai ini sangat tipis dan cukup dekat jika dibandingkan dengan nilai dagang Costa Rica dengan Taiwan yaitu rata-rata mencapai angka USD 30 juta per tahunnya (Hongbo, 2017, hal.311).

Pergeseran besar pada 2006 di Costa Rica pun terjadi. Hal ini dipicu karena dijalinnya perjanjian perdagangan antara China dengan Costa Rica. Pada 2007 China menjanjikan impor sebesar USD 1.7 Milyar dari Costa Rica melalui *FTA*. Pergantian pengakuan diplomatik lantas terjadi di Costa Rica. Pemerintah Costa Rica memilih untuk meninggalkan Taiwan karena adanya tawaran perdagangan China yang jauh lebih besar dari nilai dagang Costa Rica dengan Taiwan pada periode yang sama. Pasca 2007, pemerintah Costa Rica juga dijanjikan untuk diberi bantuan finansial senilai USD 130 Juta. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk timbal balik dari China atas bergantinya pengakuan diplomatik Costa Rica. Pada 2013, Costa Rica mendapat pinjaman dengan bunga ringan dari China sebesar USD 300 Juta (Hongbo, 2017, hal.311). Tindakan China ini memastikan

semakin besarnya ketergantungan Costa Rica terhadap perekonomian China yang berhasil memberikan penawaran dagang dan juga bantuan finansial dengan angka yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Taiwan.

Berdasarkan uraian data di atas, pemerintah China berhasil melakukan dua bentuk diplomasi ekonomi untuk bisa mendapatkan pengakuan diplomatiknya dari pihak Costa Rica. Pada awalnya China memulai hubungan ekonominya dengan Costa Rica melalui hubungan dagang pada awal periode 2000, melihat adanya potensi dari China, tentunya Costa Rica mencoba untuk menjalin hubungan dagang dengan China dan juga Taiwan secara sekaligus. Namun ketika China berhasil memberikan penawaran impor sebesar USD 1.7 Milyar ditambah dengan pemberian bantuan dana tambahan sebesar USD 130 Juta kepada Costa Rica dianggap sebagai upaya China untuk mematenkan hubungan diplomatiknya dengan Costa Rica. Diplomasi yang dilakukan oleh China seperti Taiwan, yaitu berfokus pada perdagangan dan pemberian bantuan finansial. Tindakan Taiwan dalam menjaga hubungannya dengan Costa Rica juga ditiru dan dipraktikan oleh pemerintah China. Hal ini terlihat ketika China memberikan bantuan kembali pada 2013. Tindakan ini ialah upaya China untuk memperkuat kerjasama antara China dengan Costa Rica.

Menurut Dr. Ferchen, peningkatan impor dan juga pemberian bantuan finansial ini dilakukan oleh China merupakan bentuk upaya China untuk melanggengkan hubungan China dengan Costa Rica. China yang memiliki sumber kekuatan ekonomi yang sangat besar mengingat perkembangan ekonominya pasca reformasi ekonomi 1978, memberikan kesempatan yang jauh lebih besar bagi China untuk bisa mengungguli Taiwan dalam kompetisi diplomasi ekonomi ini. China berhasil mendapatkan pengakuan dari Costa Rica dengan dua macam diplomasi ekonomi. Pada tahap pertama, China berhasil menggunakan penawaran perdagangannya dengan Costa Rica di 2007. Pada tahap kedua,

China menggunakan *foreign aid* untuk memperkuat hubungan diplomatik antara China dengan Taiwan, khususnya pada 2007 dan 2013<sup>iii</sup>.

### **Kompetisi Diplomasi Ekonomi China dengan Taiwan di Panama, Republik Dominika dan El Salvador**

Semejak hubungan diplomatik antara Panama dan Taiwan terjalin pada 1912, pemerintah Taiwan terus mencoba untuk mempertahankan hubungan ini dengan berbagai cara. Selama periode 1990 sampai dengan 2005, pemerintah Taiwan mencoba untuk menjaga hubungannya dengan Panama melalui diplomasi ekonomi berupa *financial aid*. Dalam rentang waktu ini, pemerintah Taiwan melalui IECDF (*International Economic Cooperation and Development Fund*) terus memberikan bantuan dana kepada Panama dengan nilai total mencapai angka USD 250 juta. Pemerintah Taiwan melakukan tindakan ini dengan tujuan yang selaras dengan kepentingan politiknya sendiri yaitu untuk mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Panama. Seolah tindakan pemberian bantuan finansial ini ialah sebagai bentuk hadiah dari Taiwan kepada Panama dikarenakan kesetiaan Panama kepada Taiwan selama ini. Pernyataan ini didukung oleh pendapat dari Matt Ferchen menyatakan bahwa pemberian bantuan yang dilakukan Taiwan kepada Panama, tidak lebih sebagai bentuk upaya Taiwan untuk mendapatkan kesetiaan politik atau *allegiance* dari Panama dengan tetap setianya Panama dalam mengakui pemerintah Taiwan sebagai perwakilan resmi Cina<sup>iv</sup>.

Berkat bertahannya hubungan diplomatik antara Panama dengan Taiwan selama ini, pemerintah Taiwan juga berhasil melakukan perdagangan dengan Panama dengan total nilai dagang sebesar USD 78 Juta dari periode 1989 sampai dengan 2000. Perdagangan ini juga dilakukan oleh Taiwan dan Panama sebagai bentuk upaya untuk menjaga hubungan diplomatik diantara keduanya. Terlebih dari sisi Taiwan, tentunya Taiwan tidak bisa

melakukan diplomasi ekonomi dengan terus memberikan bantuan tanpa adanya pemasukan ekonomi. Maka dari itu, kerjasama perdagangan yang terjadi antara Taiwan dengan Panama ini, tidak hanya dapat berguna untuk menjaga hubungan diantara keduanya, namun juga memberikan keuntungan ekonomis bagi pihak Taiwan yang tentunya sangat memerlukan hal tersebut. Mengingat begitu banyaknya dana yang dikeluarkan oleh Taiwan untuk menjaga hubungan diplomatik yang dimilikinya pada saat itu.

Pada 1990, pemerintah Taiwan telah memberikan bantuan dana melalui IECDF kepada El Salvador dengan total sebesar USD 175 juta. Bantuan ini ditujukan untuk mendorong jumlah investasi yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan Taiwan di negara tersebut. Terakhir, pada bulan Juni 2006, Republik Dominika mendapatkan bantuan finansial sebesar USD 60 juta. Dalam tiga kasus diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah Taiwan lebih cenderung memberikan bantuan ekonomi dibandingkan dengan menjalin kerjasama atau perdagangan internasional. Melihat adanya peningkatan GDP negara yang terus menerus dialami oleh Taiwan pada periode 1980, pemerintah Taiwan terus berusaha keras untuk memperluas ikatan diplomatiknya dengan negara lain, salah satunya ialah untuk mempertahankan ikatan diplomatik yang telah dimiliki<sup>v</sup>.

Diplomasi ekonomi yang dilakukan Taiwan dalam mempertahankan ikatan diplomatik yang dimilikinya ini dianggap tidak tergolong kedalam diplomasi ekonomi bentuk diplomasi komersial. Hal ini dikarenakan diplomasi komersial pada dasarnya bertumpu pada aktifitas perdagangan yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak. Sebaliknya, diplomasi ekonomi yang dilakukan Taiwan cenderung lebih mengarah kepada pemberian bantuan finansial secara percuma atau diplomasi ekonomi berbentuk *financial aid*. Terlihat dengan jelas bahwa pemerintah Taiwan seolah memberikan bantuan ekonomi tersebut sebagai bentuk

timbang balik akan pengakuan yang didapatkan dari keempat negara di atas. Taiwan memberikan bantuan tersebut tidak sepenuhnya dengan tujuan membantu, melainkan sebagai bentuk “ucapan terima kasih” dan juga sebagai penjamin untuk melanggengkan ikatan diplomasi yang dimilikinya tersebut.

Memang, pemerintah Taiwan juga memiliki ikatan perdagangan dengan ketiga negara di atas, misalnya pada periode 2000 sampai dengan 2005, nilai perdagangan antara Taiwan dengan Republik Dominika mencapai angka USD 221 Juta, pemerintah Taiwan juga berhasil menjalin perdagangan dengan El Salvador dengan nilai dagang sebesar USD 55 Juta selama periode 2000-2007. Namun, pemerintah Taiwan lebih cenderung menggunakan *dollar diplomacy* dengan memberikan bantuan secara percuma untuk menjaga agar Taiwan bisa tetap memiliki hubungan formal sehingga Taiwan bisa tetap melakukan perdagangan. Pemerintahan Taiwan tidak menggunakan perdagangannya untuk mempertahankan hubungan diplomatik yang ada. Sebaliknya, Taiwan justru memberikan bantuan kepada negara-negara di atas agar tetap bisa melakukan hubungan perdagangan. Melihat fenomena ini, dapat dilihat bahwa Taiwan sangat berusaha keras untuk bisa mempertahankan ikatan diplomatik yang masih dimilikinya. Taiwan bahkan sampai membuat instansi yang didesain secara khusus untuk melaksanakan tugas ini, hal ini melihat adanya tekanan dari pemerintah China yang mencoba menggeser keberadaan pemerintah Taiwan.

Di sisi lain, pemerintah China dianggap sengaja melakukan diplomasi ekonomi berbentuk *financial aid* atau *yuan diplomacy* dengan tujuan untuk mengisolasi Taiwan di wilayah Amerika Latin. Hal tersebut dapat dianalisis berdasarkan bentuk diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh China. Tindakan China dalam memberikan bantuan dana terhadap Panama, Republik Dominika, dan El Salvador merupakan tindakan politik yang berlandaskan kekuatan ekonomi. Dalam kasus

ini, diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh China berupa pemberian pembangunan fasilitas pelabuhan untuk Panama senilai USD 165 juta yang diberikan pada 2017, bantuan dana bebas bunga sebesar USD 3.1 milyar kepada Republik Dominika pada 2017, dan pembangunan pelabuhan yang dilakukan perusahaan China kepada El Salvador pada 2017. Semua bentuk diplomasi ini merupakan diplomasi ekonomi berbentuk *financial aid*. Tujuan politik luar negeri China sangatlah erat dengan dilakukannya diplomasi ekonomi ini. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diterima sebagai bentuk timbal balik ketika diplomasi ini dilaksanakan lebih berarah kepada politik ketimbang nilai materialistik.

Pernyataan ini didukung dengan pendapat dari Dr Ferchen yang menyatakan bahwa terdapat intensitas tinggi pada periode 2017-2018 sendiri, khususnya di wilayah Amerika Latin ketika ketiga negara di atas mendapatkan bantuan dari China dengan intensitas yang cukup tinggi dan nilai yang cukup besar. Hal ini dilihat bahwa terdapat alasan atau penyebab khusus mengapa intensitas ini mengalami peningkatan dalam periode ini saja. Peningkatan intensitas dari China ini dianggap sebagai salah satu penyebab mengapa ketiga negara tersebut memilih untuk menjalin kerjasama diplomatik dengan China<sup>vi</sup>.

China sendiri dalam sejarahnya sudah tidak asing dalam melakukan diplomasi bentuk ini. *Yuan Diplomacy* yang dikenal sebagai diplomasi ekonomi China dimana pemerintah China memberikan bantuan dana secara percuma kepada negara-negara kecil merupakan istilah yang sering kali disebutkan ketika fenomena ini terjadi. *Yuan diplomacy* dilakukan oleh pemerintah China dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara yang menerima bantuan tersebut. Contoh ketara dari *yuan diplomacy* sendiri ialah ketika China memberikan banyak bantuan di wilayah Afrika, hal ini menjadikan beberapa negara Afrika seperti Zimbabwe, Kongo, Kenya dan yang lainnya memilih untuk memberikan dukungan kepada China ketimbang negara *super power* lain seperti

Amerika Serikat atau Rusia dalam hubungan luar negerinya. Terbukti, negara-negara Afrika diatas lebih memilih untuk menggunakan Yuan atau Renminbi ketimbang Dollar Amerika sebagai mata uang dalam melaksanakan perdagangan internasionalnya. (Trinkunas, 2016, hal. 16-18)

Pendapat dari Dr Ferchen juga mendukung argumen ini dengan menekankan bahwa dengan memberikan bantuan secara percuma, tidak akan ada keuntungan material yang didapatkan oleh negara pelaku. Keuntungan yang didapatkan oleh negara pelaku justru lebih berbentuk kepada *allegiance* atau kesetiaan dari negara penerima. Hal ini terjadi karena terciptanya hubungan yang tidak seimbang antara negara pendonor dengan negara penerima. Dikarenakan adanya ketergantungan dari negara penerima akan bantuan ekonomi yang diberikan negara pendonor, maka negara penerima akan melakukan apapun yang dirasa akan membuat senang negara pendonor sehingga bantuan ekonomi yang diberikan negara pendonor akan terus berjalan<sup>vii</sup>. Berdasarkan pendapat ini, maka dapat terlihat bahwa pemberian bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah China ke tiga negara diatas, tidak semata-merta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi seperti yang dilakukan di Costa Rica, melainkan karena adanya harapan dukungan politik dengan dijalinnya hubungan diplomatik antara negara-negara terkait.

### **Kemenangan China Melawan Taiwan di Amerika Latin Periode 2007-2018**

Kemenangan China ini selain karena pemberian bantuan dari China kepada keempat negara diatas, juga karena adanya peningkatan kekuatan ekonomi China secara umum yang terus terjadi semenjak adanya revolusi ekonomi China pada 1978. Bergantinya posisi Taiwan dengan China di PBB pada 1971 merupakan salah satu faktor terciptanya *trend* dalam bergesernya ikatan diplomatik negara-negara diatas. Keempat negara ini melihat bahwa dengan situasi ekonomi dan politik

China yang ada saat ini, tentunya bisa memberikan keuntungan bagi negara-negara yang menjalin kerjasama resmi dengan China. Pergeseran ini dinilai sebagai tindakan yang rasional karena selama kompetisi ini terjadi, China berhasil memberikan atau menawarkan jumlah bantuan yang lebih besar daripada Taiwan. Selain itu, posisi China saat ini yang dianggap sebagai salah satu *super power* di dunia sendiri tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi keempat negara ini, berseberangan dengan Taiwan yang harus berjuang dengan sedikitnya pengakuan yang ada dan juga tekanan langsung dari pemerintah China.

Peningkatan kekuatan ekonomi China juga didukung karena adanya revolusi ekonomi China yang mendukung adanya produksi dan pengolahan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta. Keterbukaan China terhadap pasar dagang internasional, posisi China di PBB dan juga sumber daya alam dan manusia China yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Taiwan, memberikan keunggulan tersendiri bagi China untuk bisa mengalahkan Taiwan dalam penggunaan kekuatan ekonominya. China yang menguasai 99% wilayah Cina di *mainland* tentunya memiliki pasokan sumber daya alam yang jauh lebih besar dan lebih beragam jika dibandingkan dengan Taiwan yang hanya menguasai pulau selatan saja. Keunggulan China ini sendiri menjadikan nilai tambah bagi China dalam menggunakan kekuatan ekonominya sebagai sarana instrumen diplomasinya terhadap empat negara ini. Tidak hanya China memiliki pasokan dana untuk diberikan sebagai bentuk bantuan yang lebih besar, namun China juga memiliki pasokan sumber daya yang jauh lebih besar sehingga penggunaan diplomasi ekonomi baik dalam bentuk *financial aid* dan *commercial diplomacy* bisa termaksimalkan.

Kemenangan telak China atas Taiwan dalam kompetisi ini juga menunjukkan adanya keterampilan pemerintah China dalam mendapatkan pengakuan dari negara lain melalui diplomasi ekonominya. Menurut pakar

ekonomi politik Dr Ferchen, kemenangan China atas Taiwan terjadi karena secara data dan kondisi di lapangan, China memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Taiwan. Dari segi ekonomi, China jelas memiliki GDP yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Taiwan. GDP China yang mencapai angka USD 12.24 Trilyun tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan GDP Taiwan yang hanya mencapai angka USD 572 Milyar. Hal ini memperlihatkan adanya keunggulan China atas Taiwan dari segi ekonomi yang tentunya memberikan keuntungan tersendiri ketika China menggunakan kekuatan ekonominya sebagai instrumen diplomasi terhadap keempat negara tersebut. Keempat negara di atas menyadari bahwa keuntungan yang didapatkan akan lebih besar jika mereka memilih untuk mengakui China dan meninggalkan Taiwan. Hal ini karena China terlihat memiliki daya beli yang sangat besar, persediaan ekonomi yang kuat dan juga kondisi politik yang mumpuni. Keempat negara ini menyadari bahwa bantuan yang diberikan dari Taiwan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi China, dan tentunya mereka tidak bisa bergantung pada bantuan Taiwan saja. Maka dari itu, mereka yang melihat prospek ekonomi China yang semakin besar, memutuskan untuk memilih sisi China<sup>viii</sup>.

Dalam kasus keputusan hubungan diplomatik Taiwan dan beralihnya keempat negara tersebut kepada pemerintah China selama periode 2007 sampai dengan 2018, terdapat perbedaan dalam penggunaan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh China. Pertama, beralihnya Costa Rica kepada China pada 2007 tidak hanya didasari dari bantuan yang diberikan oleh China. Sebaliknya, Costa Rica melakukan peralihan pengakuan diplomatik kepada China dikarenakan Costa Rica melihat potensi ekonomi China sebagai *partner* dagang yang jauh lebih menguntungkan ketimbang dengan Taiwan. Penawaran perjanjian perdagangan atau FTA yang diberikan China, tentunya bisa

menarik perhatian Costa Rica, mengingat daya beli China yang berpotensi lebih besar dibandingkan dengan Taiwan.

Dalam tiga kasus selanjutnya, jika kedua negara ini saling berkompetisi dalam melakukan diplomasi ekonomi dengan bentuk *dollar diplomacy* ataupun *yuan diplomacy*, pemerintah China dapat terlihat memiliki keunggulan yang tidak dapat dimenangkan oleh Taiwan. China yang jelas-jelas memiliki pemasukan negara yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Taiwan, juga memiliki anggaran pengeluaran dana yang tentunya juga lebih besar. Pengeluaran negara yang dimaksud ini juga salah satunya ialah untuk keperluan *yuan diplomacy* China yang dilakukan untuk menyaingi pemerintahan Taiwan di Amerika Latin pada periode ini. Tindakan China yang dilakukan secara agresif untuk memberikan bantuan finansial secara percuma kepada 3 negara dengan nilai di atas USD 3 milyar, memperlihatkan betapa mudahnya China menggunakan kekuatan ekonominya untuk mengalahkan atau *overpowered* Taiwan dalam kompetisi diplomasi ekonomi bentuk *financial aid* ini. Kemenangan mutlak China atas Taiwan tentunya didasari dari kekuatan ekonomi China yang jauh lebih besar dibandingkan Taiwan. Perbedaan ini menyebabkan pemerintahan China bisa memberikan bantuan finansial yang bahkan tidak bisa ditawarkan oleh Taiwan. Ketidakmampuan Taiwan dalam menawarkan bantuan ekonomi dalam jumlah yang sama seperti China inilah yang dianggap menjadi salah satu faktor penyebab beralihnya pengakuan diplomatik tiga negara di atas.

Kemenangan kompetisi China atas Taiwan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan kekuatan ekonomi China pasca reformasi ekonomi China pada 1978. Melalui reformasi tersebut, negara-negara lain menjadi tertarik untuk melakukan perdagangan dengan China yang jelas-jelas memiliki potensi ekonomis yang lebih besar. Ditambah lagi dengan masuknya China di PBB dengan menggantikan posisi Taiwan pada 1971 menjadi nilai jual tambah bagi China terhadap negara-negara

lain. Dengan masuknya China kedalam PBB, tentunya potensi ekonomi yang dimiliki China akan meningkat jauh lebih besar, dan tentunya hal ini memunculkan *desire* bagi negara-negara lain yang belum mengakui China. Kemenangan China tidak hanya dapat disimpulkan berdasarkan diplomasi ekonomi yang dilakukannya, melainkan juga karena secara strategis, China jauh lebih bernilai untuk dijadikan rekan dalam menjalin kerjasama.

Penyerahan hak kelola kepada pihak-pihak swasta yang namun tetap adanya kendali dari negara juga menjadi alasan mengapa pemerintah China bisa lebih unggul dalam melaksanakan diplomasi ekonominya kepada Taiwan dalam fenomena ini. China bisa menggunakan perusahaan-perusahaan ini, tidak hanya untuk mengelola sumber daya alam dan manusia milik China untuk mendapatkan keuntungan saja yang mana jelas-jelas memperkuat kondisi ekonomi China. Namun, China juga bisa menggunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk kepentingan politik luar negeri China, salah satunya ialah penerapan kebijakan satu daratan Cina di Amerika Latin. Dalam kasus ini ialah ketika Panama diberikan bantuan pembangunan pelabuhan senilai USD 165 juta melalui perusahaan China bernama *China Harbour Engineering Company Ltd* demi melancarkan kepentingan China di Panama. Praktik inipun nampak berhasil, mengingat pasca dijanjikannya pembangunan tersebut, pemerintah Panama memutuskan untuk menjalin hubungan diplomasi dengan China.

### **Implementasi Kebijakan Satu China dalam Kompetisi Diplomasi Ekonomi China dengan Taiwan di Amerika Latin**

Baik Taiwan ataupun China memiliki interpretasinya masing-masing terkait dengan kebijakan satu daratan Cina. Kompetisi yang terjadi diantara kedua pemerintahan ini terjadi karena adanya ambisi dari kedua belah pihak untuk mengungguli satu sama lain dan berlomba untuk mendapatkan lebih banyak

pengakuan dari negara-negara dalam komunitas internasional. Munculnya kompetisi yang melibatkan pemerintahan Taiwan dan pemerintahan China disebabkan karena adanya implementasi dari kedua belah pihak yang memiliki pandangan berbeda akan kebijakan satu daratan Cina. Implementasi ini juga termasuk kedalam kebijakan luar negeri dan juga praktik diplomasi yang dilakukan kedua negara ini terhadap negara-negara lain.

Di sisi Taiwan, salah satu implementasi kebijakan satu daratan Cina perspektif Taiwan ialah praktik diplomasi ekonomi Taiwan yang dilakukan melalui IECDF kepada negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan sebagian besar bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah Taiwan, hanya diberikan kepada negara yang masih mengakui Taiwan dan kepada negara yang berpotensi untuk mengakui Taiwan. Kebijakan ini muncul didasari karena adanya kepercayaan pemerintah Taiwan yang menganggap dirinya merupakan perwakilan sah Cina di dalam sistem internasional. Pemberian bantuan ini ditujukan agar pemerintah Taiwan bisa mempertahankan pengakuan yang masih dimilikinya sekaligus juga untuk memperbanyak jumlah pengakuan yang dapat diperoleh dari negara-negara yang memiliki potensi tersebut. Namun, dikarenakan adanya dua interpretasi yang berbeda dari pemerintah Taiwan akan kebijakan satu daratan Cina, maka terdapat dua implementasi kebijakan yang berbeda pula ketika Taiwan melakukan diplomasi ekonominya ini.

*Pertama*, ketika pemerintah Taiwan dikuasai oleh partai *Kuomintang*, mereka menganggap bahwa Taiwan dan China adalah dua entitas yang harus bersatu sebagai pihak yang menguasai Cina. Taiwan dibawah partai *Kuomintang* percaya bahwa suatu saat, daratan Cina akan kembali dikuasai oleh pemerintah Taiwan. Dengan didasari kepercayaan partai *kuomintang* ini, maka pemerintahan Taiwan menggunakan diplomasi ekonominya melalui IECDF untuk mempertahankan ikatan diplomasi negara-negara yang masih mengakui

Taiwan dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang juga tidak mengakui China sebagai perwakilan resmi dari Cina. Disebabkan karena banyaknya negara-negara yang mengalihkan pengakuannya dari Taiwan kepada China, maka diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Taiwan juga ditujukan untuk mendapatkan kembali pengakuan dari negara-negara tersebut dan menggeser kembali posisi China. Tindakan ini mereka lakukan karena mereka percaya bahwa merekalah satu-satunya pemerintahan Cina di dunia. Mereka menolak adanya dua Cina yang ikut serta dalam hubungan internasional secara bersama-sama.

Berseberangan jauh dengan pemerintahan Taiwan yang berada dibawah partai *kuomintang*, pemerintahan Taiwan yang sejak 2000 dikuasai oleh partai DPP memiliki interpretasi yang berbeda mengenai kebijakan satu daratan Cina. Partai DPP menganggap bahwa pandangan kebijakan satu daratan Cina merupakan pandangan yang sudah kuno. Oleh karena itu, partai DPP menilai bahwa Taiwan justru harus bisa memisahkan diri dan menjadi negara merdeka yang terpisah dari cengkraman pemerintah China. Partai DPP menganggap bahwa saat ini sudah terdapat dua Cina yang berbeda. Partai DPP juga menilai bahwa reunifikasi dalam bentuk apapun dan dimenangkan oleh pihak manapun, tidak akan bersifat ideal bagi kedua belah pihak. Asumsi ini didasari fakta bahwa sudah terlalu banyaknya perbedaan yang muncul antara pemerintahan di pulau Taiwan dengan pemerintahan China di pulau utama atau *mainland*.

Dengan berkuasanya partai DPP di Taiwan sejak 2000, pemerintahan Taiwan mulai melaksanakan diplomasinya dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara yang sebelumnya sudah mengganti pengakuannya menjadi China untuk sekaligus mengakui pemerintah Taiwan sebagai negara yang berbeda dari China. Sejak 2000, pemerintah Taiwan tidak hanya menggunakan IECDF untuk mempertahankan ikatan diplomatik yang dimiliki, melainkan juga untuk mendapatkan dukungan dari negara-

negara lain agar kemerdekaan Taiwan bisa tercapai dan semakin terpisah dari kendali pemerintah China. Saat ini, dibawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing-Wen yang berasal dari partai DPP, pemerintah Taiwan semakin berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain untuk bisa menjadi negara yang terpisah dari China. Presiden Tsai Ing-Wen juga terus mendorong Taiwan untuk mendapatkan dukungan dari negara lain dan terus bersikeras untuk menolak upaya reunifikasi yang direncanakan oleh China.

Di sisi lain, pemerintah China tentunya merasa terganggu sekaligus terancam dengan adanya upaya Taiwan untuk memisahkan diri dari China ini. Peningkatan intensitas Taiwan pasca tahun 2000 dimana partai DPP yang tidak mempercayai konsep satu daratan Cina ini, tentunya menjadikan sebuah insecurity bagi kedaulatan pemerintah China. Pemerintah China yang sebaliknya mencoba untuk menyatukan Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya ini tentunya merasa terancam dengan terjadinya hal tersebut. Salah satu respon pemerintah China terhadap upaya Taiwan untuk memerdekakan diri ialah dengan menciptakan hukum anti-pemisahan diri atau *anti-secession law*. Hukum yang diratifikasi pada 2005 ini merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan satu daratan Cina perspektif China yang menolak keras kemerdekaan Taiwan. Dengan berlandaskan hukum ini, China meyakini bahwa pemerintah China akan melakukan tindakan apapun yang dirasa perlu untuk bisa mengembalikan Taiwan kembali menjadi bagian dari wilayah kedaulatan China. Salah satu pemerintah China yang dimaksud tersebut ialah dengan menggunakan kekuatan ekonominya sebagai instrumen diplomasi untuk bisa mengisolasi Taiwan. Pengisolasian ini dilakukan agar Taiwan bisa kembali menjadi bagian dari China melalui proses reunifikasi.

Pemberian bantuan yang dilakukan China kepada empat negara ini tidak hanya dinilai karena adanya keuntungan ekonomis dengan

terbukanya peluang kerjasama antara kedua belah pihak. Namun juga terdapat keuntungan politik yang bisa diraih oleh pemerintah China. Pemberian bantuan besar-besaran yang dilakukan China yang jelas-jelas melebihi jumlah bantuan Taiwan, tentunya merupakan salah satu implementasi kebijakan satu daratan Cina ini. Bagi China, pemberian bantuan yang mencapai nilai lebih dari USD 3 Milyar kepada 4 negara ini dianggap sebagai tindakan yang diperlukan demi mencegah meredeknya Taiwan, sebagaimana tercantum dalam *anti-secession Law* dari China.

Tindakan ekonomi China ini juga tidak hanya untuk melakukan reunifikasi kepada Taiwan. China yang melihat adanya perubahan dinamika politik Taiwan yang alih-alih menerima kebijakan satu daratan Cina berdasarkan konsensus 1992 dan mencoba untuk menjaga *status quo*, justru mulai mencoba memerdekakan diri dan memisahkan diri dari China yang jelas-jelas mengganggu *status quo* yang sudah ada.

Serupa dengan kasus Costa Rica, kasus pemutusan hubungan yang dilakukan tiga negara lainnya terhadap Taiwan pada 2017-2018 dapat dianggap sebagai bentuk implementasi kebijakan satu daratan Cina yang dilakukan China terhadap Taiwan. Namun, terdapat peningkatan intensitas dari China dalam melakukan diplomasi ekonominya terhadap 3 negara ini dalam kurun waktu yang singkat. Implementasi kebijakan satu daratan Cina dianggap sangat ketara ketika China meningkatkan intensitas *yuwan diplomacy* negaranya kepada 3 negara di Amerika Latin pada 2017-2018 yaitu Panama, Republik Dominika dan El Salvador. Peningkatan ini dianggap terjadi sebagai bentuk respon pemerintahan China yang tidak menyukai tindakan Taiwan yang dianggap melanggar *status quo* yang sudah ada semenjak konsensus 1992. Tindakan Taiwan yang dimaksud China ini ialah ketika presiden Tsai Ing Wen melakukan kontak dengan Presiden baru Amerika Serikat, Presiden Donald Trump pada akhir 2016. Adanya

kontak antara kedua negara ini tentunya menimbulkan efek “was-was” bagi pemerintah China. Terjalinnnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Taiwan bisa memberikan dukungan bagi pemerintah Taiwan yang mencoba untuk memerdekakan diri. Tentunya tindakan yang dilakukan China ini dapat dianggap sebagai bentuk hukuman atas tindakan Taiwan tersebut<sup>ix</sup>.

Pemerintah China menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Taiwan merupakan salah satu bentuk upaya Taiwan untuk bisa mendapatkan kemerdekaan. Hal ini tentunya dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan China. Ancaman ini didasari karena Taiwan sendiri yang memiliki hubungan khusus dengan Amerika Serikat melalui *Taiwan relations act* 1979. Pemerintah China menganggap bahwa Taiwan yang berada dibawah kepemimpinan Tsai Ing Wen, memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan diplomatik dari Amerika Serikat untuk menjadi negara berdaulat. Maka dari itu, sebagai bentuk implementasi dari *anti-secession law* sekaligus juga dengan konstitusi negara China yang mana terdapat implementasi dari kebijakan satu daratan Cina perspektif China, maka pemerintahan China melakukan tindakan agresif dengan melakukan *yuwan diplomacy* selama periode 2017 sampai dengan 2018 kepada 3 negara Amerika Latin diatas. Pengisolasian ini dianggap sebagai sebuah bentuk “hukuman” kepada Taiwan yang dianggap telah mengganggu *status quo* dan seolah-olah menantang kedaulatan China.

Pengisolasian yang dilakukan China melalui praktik *yuwan diplomacy* ini juga dianggap sebagai sebuah bentuk ancaman dari China untuk pemerintahan Taiwan. Melalui tindakan ini, pemerintah China seolah mengancam pemerintah Taiwan untuk tidak mencoba kembali untuk memerdekakan diri. Tindakan ini juga dianggap sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 5 *anti-secession law* yang menyatakan bahwa China akan melakukan tindakan apapun untuk mencegah kemerdekaan Taiwan. Tindakan ini termasuk

baik dengan menggunakan kekerasan militer, ataupun juga penggunaan kekuatan ekonomi seperti yang terlihat dalam fenomena praktik *yuan diplomacy* yang dilakukan China kepada 3 negara di Amerika Latin pada 2017-2018.

## SIMPULAN

Kompetisi yang terjadi antara Taiwan dan Tiongkok di Amerika Latin pada periode ini terbukti menggunakan diplomasi ekonomi sebagai instrumen diplomasinya dalam bentuk bantuan finansial dan juga diplomasi komersil. Kemenangan Tiongkok atas Taiwan terjadi karena adanya keunggulan kekuatan ekonomi Tiongkok yang jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Taiwan maka menciptakan keinginan perpindahan yang lebih besar bagi negara-negara terkait. Peningkatan intensitas diplomasi ekonomi Tiongkok atas Taiwan terjadi karena berkuasanya partai DPP yang tidak mempercayai kebijakan satu China dan dianggap telah melanggar status quo yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bartke, W. (1989). *China's Economic Aid*. Munic: K.G Saur.
- Bayne, N., & Woolcock, S. (2003). *The New Economic Diplomacy : Decision-Making and Negotiation in International Relations*. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
- Blanchard, B. (2017, November 17). *After ditching Taiwan, China says Panama will get the help it needs*. Diambil 21 September 2018, dari reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-china-panama/after-ditching-taiwan-china-says-panama-will-get-the-help-it-needs-idUSKBN1DH1FZ>
- Chansoria, M. (2018, Januari 9). *Yuan Diplomacy: Panama Cuts Ties with Taiwan in Favor of the Mainland*. Diambil 21 September 2018, dari Japanforward.com: <https://japan-forward.com/yuan-diplomacy-at-work-panama-cut-ties-with-taiwan-in-favor-of-the-mainland/>
- Chen, T., & Ludena, M. P. (2014). *Chinese foreign direct investment in Latin America and the Caribbean*. Santiago: United Nations Publications.
- Chia-chi, K. (2019, Februari 14). *Taiwan and China Economic Diplomacy Competition in Latin America on 2007-2018*. (A. Baskoro, Pewawancara)
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Pubication, Inc.
- Cuchisi, J. L. (2002). *The Causes and Effects of the chinese Civil War, 1927-1949*. *Journal of Seton Hall University*, 31-35.
- Esteban, M. (2008). *The Diplomatic Battle Between Beijing and Taipei in Latin America and The Caribbean*. *Journal of European Association of Taiwan Studies*, 2-24.
- Ferchen, G. M. (2019, Maret 4). *China and Taiwan Diplomatic Competition in Latin America on 2007-2018*. (A. Baskoro, Pewawancara)
- Glaser, C. L. (2010). *Rational Theory of International Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Horton, C. (2018, Agustus 21). *El Salvador Recognizes China in Blow to Taiwan*. Diambil 21 September 2018, dari Nytimes.com: <https://www.nytimes.com/2018/08/21/world/asia/taiwan-el-salvador-diplomatic-ties.html>
- International Trade Bureau. (2010). *Trade Relations Between Taiwan and Latin American Nations*. Las Vegas: MOEA Press.
- Lee, W.-C. (1993). *Taiwan's Foreign Aid Policy*. *Asian Affairs : An American Review Vol 20 No 1*, 43-62.
- Li, H. (2005). *Rivalry between Taiwan and the PRC in Latin America*. *Journal of Chinese Political Science, vol. 10, no. 2*, 78-88.
- Liu, N. (2018, Agustus 21). *El Salvador cuts diplomatic ties with Taiwan for China*. Diambil 21 September 2018, dari Financial Times: <https://www.ft.com/content/881253a2-a4ef-11e8-8ecf-a7ae1beff35b>
- Ministry of Foreign Affairs of Taiwan. (2018, September 22). *Diplomatic Allies*. Diambil 25 September 2018, dari mofa.gov.tw: <https://www.mofa.gov.tw/en/AlliesIndex.aspx?n=DF6F8F246049F8D6&sms=A76B7230ADF29736>
- Sally, R. (2002). *Classical Liberalism and International Economic Order*. London: Routledge.

- Smith, N. (2018, Mei 1). *Dominican Republic cuts diplomatic ties with Taiwan in victory for China*. Diambil 21 September 2018, dari telegraph.co.uk: <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/01/dominican-republic-cuts-diplomatic-ties-taiwan-victory-china/>
- Strange, S. (1975). What is Economic Power and Who has it? *International Journal*, Vol. 30, No. 2, *Force and Power*, 207-224.
- Trinkunas, H. (2016). Renminbi Diplomacy? The Limits of China's Influence on Latin America's Domestic Policy. *Geoeconomics and Global Issues Paper 3*, 1-29.
- Yu, J. M. (2018, Mei 1). *Taiwan says China dangled \$3 billion to grab ally Dominican Republic*. Diambil 21 September 2018, dari reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-china-dominicanrepublic-taiwan/dominican-republic-cuts-ties-with-taiwan-in-favor-of-china-idUSKBN1I22LN?il=0>
- Zirovcic, D. (2009). Theoretical Principles of Economy Diplomacy. *Journal of Economic Studies Vol 2*, 3-10.

## BIOGRAFI

**Arif Baskoro** adalah mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran angkatan 2015. Tertarik mengkaji tentang diplomasi dan China.

**Nuraeni** adalah dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran dan aktif sebagai peneliti pada Pusat Studi Organisasi dan Kerjasama Internasional, Universitas Padjadjaran. Tertarik mengkaji tentang Regionalisme, Organisasi Internasional, dan Tata Kelola Global.

- <sup>i</sup> Data dikutip dari berbagai sumber berdasarkan jurnal "*The role of dollar diplomacy in China-Taiwan Diplomatic Competition in the Caribbean and Central America*" oleh Olsen, 2009, hal. 32.
- <sup>ii</sup> Berdasarkan wawancara dengan bapak Kang Chia-chi selaku Direktur Pers dan Informasi TETO pada tanggal 14 Februari 2019
- <sup>iii</sup> Berdasarkan jawaban korespondensi Dr Matthew Ferchen pada tanggal 4 maret 2019 melalui media komunikasi surat elektronik
- <sup>iv</sup> Berdasarkan jawaban korespondensi Dr Matthew Ferchen pada tanggal 4 maret 2019 melalui media komunikasi surat elektronik
- <sup>v</sup> Data diambil berdasarkan IECDF Taiwan dari jurnal ilmiah berjudul "Taiwan's Foreign Aid

Policy" oleh Wei-Chin Lee tahun 2014, halaman 48.

- <sup>vi</sup> Berdasarkan jawaban korespondensi Dr Matthew Ferchen pada tanggal 4 maret 2019 melalui media komunikasi surat elektronik
- <sup>vii</sup> Berdasarkan jawaban korespondensi Dr Matthew Ferchen pada tanggal 4 maret 2019 melalui media komunikasi surat elektronik
- <sup>viii</sup> Berdasarkan jawaban korespondensi Dr Matthew Ferchen pada tanggal 4 maret 2019 melalui media komunikasi surat elektronik
- <sup>ix</sup> Berdasarkan jawaban korespondensi Dr Matthew Ferchen pada tanggal 4 maret 2019 melalui media komunikasi surat elektronik